

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Morissan (2005:17) merupakan cara untuk mengetahui seluruh keinginan dari masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan negara, selain itu pemilu juga dipergunakan untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam demokrasi serta menjamin adanya peralihan pemerintahan yang tertib dan aman. Pemilu di Indonesia diatur Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta Anggota DPRD yang berlandaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi oleh karena diseluruh pemerintahannya baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dipilih melalui Pemilu. Hal itu dimulai sejak terjadinya pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Di daerah sejak tahun 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyatnya dan tentu saja ini berbeda dengan masa Orde Baru maupun pada awal reformasi dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Terhitung sejak Pilkada langsung tahun 2005 di wilayah administratif Jawa Tengah sudah diselenggarakan 4 putaran pilkada untuk Pilkada bupati dan walikota di 21 kabupaten/kota dan 3 putaran Pilkada untuk 14 kabupaten/kota dan Pilkada gubernur. Pilkada Gubernur Jawa Tengah terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan Pilkada (serentak) di 21 kabupaten/kota pada tahun 2020 serta sebelumnya ada

Pemilu Serentak 2019, sebuah perjalanan panjang demokrasi di Provinsi Jawa Tengah terutama pasca reformasi dan kebijakan desentralisasi.

Pilkada yang dilakukan secara langsung ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat pemilih untuk ikut berpartisipasi. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam demokrasi, setiap orang punya satu suara dan setiap suara punya satu nilai (OPOVOV). Penduduk WNI yang sudah memiliki usia 17 tahun atau sudah kawin dan memenuhi syarat dapat memilih (*to vote*) calon pemimpin daerahnya atau dapat mengajukan dirinya untuk dipilih (*to be voted*) menjadi pemimpin daerah tersebut.

Partisipasi politik merupakan karakteristik demokrasi tidaknya di suatu negara. Melalui partisipasi politik rakyat memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang kemudian dengan adanya kebijakan tersebut maka masyarakat akan mendapatkan.<sup>1</sup> Partisipasi politik oleh masyarakat sangat banyak bentuknya, namun Pemilu merupakan kegiatan yang paling umum dan diketahui banyak oleh masyarakat luas. Kemudahan dan kepraktisan yang cukup datang ke TPS dan memberikan suaranya sudah “menjadi kebiasaan” terutama pasca-Reformasi yang semua jabatan politik diisi melalui Pemilu.

Walaupun hanya memberikan suara di TPS tetapi ada makna didalamnya yaitu pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya. Apabila terdapat kesesuaian antara pemimpin dengan rakyat maka pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya akan mendapat dukungan

---

<sup>1</sup> Sudijono, Sastroatmojo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Press, 1995, Halaman 5-6.

penuh dari rakyat dan mampu untuk menghasilkan perkembangan daerah yang semakin baik. Pada tahun 2020 kembali digelar pilkada (serentak) di 270 daerah, rinciannya di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Di Jawa Tengah Pilkada 2020 diikuti oleh 21 kabupaten/kota. Pilkada 2020 terbilang berbeda oleh karena diselenggarakan pada saat pandemic Covid-19, sempat ditunda tetapi akhirnya diputuskan tetap diselenggarakan pada tahun 2020 dengan dilakukan revisi jadwal pada sejumlah tahapannya antara lain tanggal pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Selain dilakukan pergeseran jadwal waktu sejumlah tahapan juga digunakannya aturan protokol kesehatan di semua tahapan Pilkada lanjutan. Pandemic Covid-19 adalah bencana non alam yang pencegahan penularannya dengan menerapkan protokol kesehatan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan.

Bencana pandemi Covid-19 juga diprediksi berdampak pada partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 yang lebih rendah. Data yang dihimpun The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mengonfirmasi penurunan tersebut. Kebanyakan negara yang menggelar pemilu saat pandemic Covid-19 mengalami penurunan partisipasi pemilih, seperti di Iran turun 17,7 persen, di Tanzania partisipasinya turun 16,6 persen. Tetapi di dua negara, Korea Selatan dan Polandia, justru naik dibandingkan pemilu sebelumnya<sup>2</sup>. Sejumlah survei juga meramalkan akan terjadi penurunan angka partisipasi pemilih karena faktor pandemic Covid-19 yang ikut menambah alasan keengganan (daya tolak) pemilih datang ke TPS.

---

<sup>2</sup> Yohan Wahyu. "Daya Tarik dan Daya Tolak Pilkada". Kompas, 9 Desember 2020

KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sama besarnya dengan Pemilu 2019 yakni sebanyak 77,5 persen. Target tersebut terealisasi pada Pemilu 2019 yang capaian partisipasi pemilihnya sebesar 81%, tetapi target KPU tidak tercapai untuk Pilkada 2020 yang angka partisipasi pemilihnya sebesar 76,09%. Namun demikian, berdasar data yang dihimpun dari KPU, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 merupakan angka partisipasi Pilkada tertinggi sejak Pilkada 2014.

**Tabel 1.1**  
**Partisipasi Politik dalam Pilkada 2015-2020**

<b>Tahun Pilkada</b>	<b>Target KPU</b>	<b>Nasional</b>	<b>Jateng</b>	<b>Kota Semarang</b>
2015	77,5	69,2	68,54	65,48
2017	77,5	74,5	78,78	-
2018	77,5	73,24	73,2	72,80
2020	77,5	76,09	74,34	68,62

Sumber: dihimpun dari data KPU

Data dalam tabel di atas menunjukkan angka partisipasi politik dalam Pilkada 2020 di Kota Semarang jauh lebih rendah jika dibandingkan rerata partisipasi politik di Jawa Tengah dan nasional. Namun dibandingkan angka partisipasi Pilkada 2015, angka partisipasi Pilkada 2020 meningkat. Faktor yang diduga berperan penting dalam Pilkada 2020 adalah sampainya pesan kepada pemilih tentang jaminan keamanan pemilih dari potensi penularan Covid-19 melalui penggunaan protokol kesehatan di TPS.

Penelitian ini bertujuan meneliti strategi KPU Kota Semarang untuk sosialisasi kepada pemilih pemula, yakni mereka yang baru memasuki usia pemilih

dan pertama kali mengikuti pemilihan umum (umur 17-21 tahun). Jumlah pemilih pemula dalam Pilkada 2020 sebanyak 3 juta, untuk Kota Semarang tercatat sebanyak 25 ribu pemilih pemula<sup>3</sup>. Studi Wardhani<sup>4</sup> menemukan salah satu pendorong partisipasi pemilih pemula adalah penerimaan perangsang politik. Pemilih pemula juga kategori pemilih yang rentan untuk dimobilisasi<sup>5</sup>. Studi Jayawinangun dan Nugroho<sup>6</sup> menemukan tipologi pemilih pemula terdiri atas, dari persentase yang paling besar, adalah pemilih apatis, berikutnya oleh pemilih naif, teralienasi dan setia media, artinya semakin banyak akses berita melalui media sosial mendorong pemilih menjadi setia, sebaliknya jika tidak mengakses berita politik melalui media sosial membuat pemilih menjadi apatis.

Pemilih pemula ini masuk pada kategori pemilih muda dimana sifat dan karakter dalam perpolitikan masih sangat berbeda dengan generasi yang lebih tua karena perbedaan generasi tersebut seperti pengalaman serta tantangan juga berubah seiring berjalannya waktu. Pemilih pemula ini di daerah perkotaan umumnya punya latar belakang pelajar dan sudah mengenal perkembangan teknologi dan informasi seperti gadget, mereka mampu untuk mengakses informasi yang beredar di lingkungan masyarakat.

---

<sup>3</sup>Gatra.com. 21/7/20, 18.:06 WIB. "Puluhan Ribu Pemilih Pemula Ramaikan Pilwakot Semarang 2020". <https://www.gatra.com/detail/news/485282/politik/puluhan-ribu-pemilih-pemula-ramaikan-pilwakot-semarang-2020>

<sup>4</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis- Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1):57. DOI: 10.24114/jupiiis.v10i1.8407

<sup>5</sup> H. basuki Rahmat dan esther. 2016. Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan L1/Idyapraja*, 1/ol XLII No. 2. Hlm. 35

<sup>6</sup> Roni Jayawinangun dan David Rizar Nugroho.2019. Segmentasi Pemilih Pemula Berdasarkan Akses Berita Politik Melalui Media Sosial di Kabupaten Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Volume 17, No. 2. Hlm 157-164

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi sosialisasi KPU Kota Semarang kepada pemilih pemula dalam Pilkada Kota Semarang 2020?
2. Apakah sosialisasi KPU Kota Semarang menjadi faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kota Semarang 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kota Semarang 2020

1. Menjelaskan strategi sosialisasi KPU Kota Semarang kepada pemilih pemula dalam Pilkada Kota Semarang 2020
2. Menjelaskan pengaruh sosialisasi KPU Kota Semarang terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kota Semarang 2020

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Untuk menambah referensi kajian partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih pemula dalam pilkada

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai partisipasi politik pemilih pemula.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bentuk informasi bagi masyarakat mengenai strategi sosialisasi KPU dalam pilkada segmen pemilih.

c. Bagi pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyikapi tingkat partisipasi pemilih pemula.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang sudah dilakukan dan punya relevansi dengan penelitian dapat dilihat dari sejumlah penelitian berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti, Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
<p>Agam Primadi dkk, dengan judul Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus: Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan) (2019)</p>	<p>Menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik</p>	<p>Kualitatif deksriptif</p>	<p>Inovasi Bawaslu melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula</p>
<p>Primandha Sukma Nur Wardhani. Berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (lokasi studi Yogyakarta) (2018)</p>	<p>Mengetahui bentuk-bentuk, faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu</p>	<p>Studi pustaka</p>	<p>Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu: pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula (1) penerimaan perangsang politik; (2) karakteristik sosial; (3) sistem politik dan kepartaian; (4) perbedaan regional. Faktor penghambat: (1) kesibukan kegiatan sehari-hari; (2) perasaan tidak mampu; (3) larangan dari pihak keluarga.</p>



<b>Peneliti, Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
Ivo R. T. Mentang berjudul Peran KPU dalam Mensosialisasikan Program Pemilih Cerdas di Bolaang Mongondow	Mengetahui peran KPU dalam sosialisasi pemilih dengan berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih	Kualitatif deskriptif	KPU telah menjalankan perannya dengan baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2014.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa novelty pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini sedang dalam masa pandemi covid-19 sehingga dengan adanya perbedaan situasi dan kondisi dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan.

## 1.6 Tinjauan Teori

### 1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa latin yaitu *pars* yang memiliki arti bagian dan *capere* dimana memiliki makna untuk mengambil peranan dalam sebuah aktivitas maupun kegiatan yang memiliki hubungan dengan perpolitikan suatu negara, sehingga partisipasi dapat berarti sebagai mengambil bagian dalam politik. Dalam bahasa inggris, *participation* atau *participate* memiliki arti mengambil bagian atau peranan. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki arti yaitu ikut serta mengambil peranan dalam setiap aktivitas dan kegiatan politik suatu negara.<sup>7</sup>

Samuel Huntington dan Joan M. Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk dapat mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>8</sup> Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan baik itu oleh seseorang maupun kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik negara, kehidupan politik negara ini mencakup hal yang sangat banyak seperti pemilu yang dipergunakan untuk memilih pemimpin negara maupun daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Pendapat Miriam Budiarjo juga dikuatkan oleh Herbert McClosky yang berpendapat bahwa

---

<sup>7</sup> Suharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, Halaman 102-103.

<sup>8</sup> Huntington, Samuel P, dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penerjemah Sahabat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Halaman 5.

<sup>9</sup> Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, Halaman 367.

partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela untuk mendapatkan hak dan bagiannya dalam proses pemilihan pemimpin serta pembentukan kebijakan umum.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan hal-hal yang dilakukan dan berkaitan dengan seseorang maupun kelompok masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah baik berbentuk pemilihan pemimpin maupun pengambilan sikap dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi politik dengan demikian terkait dengan aktivitas politik warganegara pada masa Pemilu dan di luar masa Pemilu.

A. Rahman H.I membagi tipologi yang ada dalam partisipasi sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>11</sup>

1. Partisipasi aktif merupakan partisipasi yang memiliki orientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif merupakan partisipasi yang hanya berorientasi pada proses output, masyarakat hanya taat dan tunduk pada seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Golongan putih atau golput merupakan kelompok apatis karena golongan ini bukan merupakan kelompok aktif maupun pasif dan mereka

---

<sup>10</sup> Herbert McClosky, "Political Participation", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: The Macmillan Company, 1972, Halaman 3.

<sup>11</sup> A, Rahman, H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, Halaman 288.

menganggap bahwa sistem politik yang ada masih menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Milbrath dan Goel membagi tipologi partisipasi politik menjadi seperti piramida. Milbrath dan Goel membagi tingkatan partisipasi menggunakan analogi pada masa Romawi Kuno menjadi 4 yaitu:

1. Partisipasi politik apatis

Merupakan orang yang tidak ikut dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi serta menarik diri dari proses politik.

2. Partisipasi politik spectators

Merupakan orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam suatu pemilihan umum.

3. Partisipasi politik gladiator

Merupakan orang yang secara aktif memiliki keterlibatan dalam proses politik secara langsung seperti menjadi aktivis partai dan masyarakat maupun tim kampanye.

4. Pengritik

Orang yang melakukan partisipasi dalam bentuk nonkonvensional.

Partisipasi politik yang aktif dapat menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat memiliki wawasan yang cukup serta adanya tingkat kepekaan yang tinggi terhadap isu maupun situasi yang muncul di masyarakat. Selain itu terdapat pula golongan putih atau golput yang merupakan masyarakat yang kurang puas terhadap sistem politik yang ada dan dianggap menyimpang.

Rush dan Althoff menyatakan bahwa untuk dapat melihat sejauh mana partisipasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan politik maka dibagi beberapa golongan partisipan berdasarkan hirarki partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Hirarki partisipasi politik tersebut berdasarkan tingkatannya antara lain:

1. Menduduki jabatan politik/administrasi.
2. Mencari jabatan politik/administrasi.
3. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik.
4. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik.
5. Keanggotaan aktif dalam organisasi semu.
6. Keanggotaan pasif dalam organisasi semu.
7. Partisipasi dalam diskusi politik, kampanye dll.
8. Partisipasi pemberian suara.
9. Sikap apatisisme.

Apabila melihat dari gambaran hirarki partisipasi politik yang digolongkan oleh Rush dan Althoff maka dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkatan dalam hirarki tersebut maka jumlah masyarakat yang ikut untuk berpartisipasi didalamnya akan semakin sedikit, namun apabila semakin kebawah tingkatannya maka semakin kecil keterlibatan aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal ini partisipasi masyarakat melalui pemberian suara pada kegiatan pemilu merupakan suatu cara yang sangat umum dan sering dilakukan oleh masyarakat untuk memilih secara langsung anggota legislatif serta pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam aktivitas partisipasi politik maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jalannya partisipasi politik. Rush dan Althoff menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang yang salah satunya faktor perangsang politik, yaitu:<sup>12</sup>

1. Berkaitan dengan penerimaan perangsang politik, keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak pribadi, organisasi dan media massa akan memberikan pengaruh bagi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik.
2. Karakteristik sosial seseorang akan mempengaruhi karena menyangkut status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin serta keyakinan yang dianut. Karakteristik sosial tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap partisipasi politik.
3. Sifat dan sistem partai tempat individu hidup berkaitan dengan lingkungan sehingga apabila suatu negara memiliki kehidupan yang demokratis maka partai politik akan cenderung mencari dukungan massa serta memperjuangkan kepentingan massa, hal tersebut akan mendorong massa untuk berpartisipasi dalam politik.
4. Perbedaan regional merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh dalam perbedaan watak dan tingkah laku individu, perbedaan tersebut akan mendorong adanya perbedaan perilaku politik dan juga partisipasi politik.

Berkaitan dengan penerimaan perangsang politik, agen sosialisasi politik sangatlah banyak. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan

---

<sup>12</sup> Michael Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rajawali, 1989.

kegiatan sosialisasi, menurut Althoff terdapat 4 agen sosialisasi yang memiliki peran utama yaitu:

1. Keluarga.
2. Kelompok bermain
3. Media massa.
4. Lembaga pendidikan.

### **1.6.2 Strategi Sosialisasi Politik dalam Pemilu**

Partisipasi politik memiliki hubungan dengan berapa banyak pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap, beberapa strategi dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan. Strategi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk dapat mencapai tujuannya dengan menentukan tujuan serta sasaran, tindakan yang mendukung pengelolaan sumberdaya, penggunaan tindakan dan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>13</sup> Beberapa ahli mengungkapkan pendapat mengenai strategi seperti Arifin (2004) dimana strategi adalah pondasi tujuan organisasi dan strategi juga merupakan rencana komprehensif untuk menghadapi ancaman dari luar, sedangkan menurut Effendi strategi adalah perencanaan untuk mencapai tujuan dengan taktik operasional sehingga khalayak yang menjadi sasaran tersebut mampu dijangkau secara efektif.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka

---

<sup>13</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2015, Hal. 64.

<sup>14</sup> Effendi, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, Hal. 32.

dapat disimpulkan strategi merupakan perencanaan dan tindakan yang telah disusun sebelumnya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperkirakan segala kelebihan dan kelemahan yang ada dalam strategi tersebut.

Dalam pemilu maka strategi merupakan rencana yang dibentuk oleh KPU untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Didalam strategi tersebut KPU telah mengatur beberapa cara supaya mampu mencapai tujuannya, strategi yang ditetapkan oleh KPU sudah mencakup dari berbagai macam hal antara lain yaitu:

1. Pemanfaatan Teknologi

Dalam era globalisasi menuntut seluruh individu untuk mampu mengoperasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, teknologi tersebut seiring berjalannya waktu terus berkembang dengan cepat, ketersediaan internet dan kemudahan dalam penggunaannya membuat akses informasi yang disediakan akan semakin cepat sampai kepada publik. Kelebihan dari teknologi berupa kemudahan dan kecepatan membuat sosialisasi yang dilakukan menjadi lebih mudah dan mampu untuk mendorong angka partisipasi, transparansi dan kemudahan akses setiap saat akan semakin memudahkan untuk melakukan pendidikan pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu teknologi yang dimanfaatkan dengan baik dan benar akan mampu



menyelesaikan persoalan dari partisipasi pemilu yang masih rendah karena didalamnya akan memberikan edukasi yang lengkap.

## 2. Pemanfaatan Media Massa

Media massa saat ini memiliki sifat yang konvensional, tetapi ini masih cukup efektif dalam menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat luas, walaupun tidak secepat dari penggunaan teknologi namun cara ini masih relevan di era saat ini untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu melalui media cetak seperti Koran dan majalah maupun media elektronik seperti televisi. Penggunaan media massa akan mampu untuk mempengaruhi partisipasi politik pemilih karena media ini masih sangat banyak dipergunakan oleh masyarakat umum.

## 3. Lembaga pendidikan

Dalam melakukan sosialisasi maka melalui lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai cara yang paling mudah dan sering dipergunakan oleh KPU untuk sosialisasi tentang pemilu. Persebaran institusi pendidikan mulai dari tingkat yang tinggi hingga tingkat yang rendah seluruhnya tersebar di wilayah sehingga penyampaiannya akan lebih luas. Melalui pendidikan maka sasaran dapat diberikan edukasi tentang pendidikan pemilih supaya mampu untuk membentuk sikap dan perilaku pemilih yang baik sehingga apabila hal tersebut mampu dilakukan maka dapat mempengaruhi partisipasi politik.

## 4. Aktivitas dari kelompok/komunitas

Beragamnya aktivitas masyarakat seringkali membentuk suatu komunitas yang memiliki kesamaan dalam berinteraksi baik itu hobi maupun keseragaman dalam tujuan. Hal tersebut memang tidak memiliki kaitannya dengan politik tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan edukasi mengenai pendidikan politik. Terlebih lagi jika kelompok tersebut beranggotakan individu yang suka dengan proses demokrasi, maka dapat dimanfaatkan KPU untuk membantu menyampaikan pesan edukasi kepada seluruh masyarakat melalui relawan.

### **1.6.3 Sosialisasi Politik dalam Pemilu**

Sosialisasi politik merupakan suatu bagian dari proses sosialisasi yang didalamnya secara khusus membentuk nilai-nilai politik yang mampu untuk memperlihatkan cara yang seharusnya bagaimana sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Sosialisasi politik lebih menekankan pada proses dalam pembentukan sikap serta perilaku yang memiliki orientasi pada politik, disamping itu sosialisasi politik merupakan sebuah alat media perantara untuk dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Menurut pendapat Althoff, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan politik kepada seseorang maupun masyarakat sehingga akan diketahui tanggapan dan reaksi dari seseorang/masyarakat terhadap peristiwa politik yang sedang terjadi. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang digunakan untuk memperkenalkan dan memberikan suatu edukasi pengetahuan tentang politik kepada masyarakat supaya

masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dan mengambil keputusan terkait sikapnya terhadap fenomena politik yang sedang terjadi seperti pemilu. Dalam berlangsungnya politik, sosialisasi menjadi proses belajar menjadi bagian dari politik. Hal tersebut sangatlah penting karena keterlibatan individu atau masyarakat dalam suatu sistem politik Negara untuk ikut berpartisipasi didalamnya sangatlah dibutuhkan.

#### **1.6.4 Faktor Sosialisasi Politik dalam Partisipasi Pemilih**

Keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu merupakan bentuk kesadaran politik yang dimiliki oleh individu, artinya adalah sebagai warga Negara yang baik dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik yang berlaku maka akan memunculkan kesadaran akan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan berpartisipasi melalui penggunaan hak pilih. KPU selaku penyelenggara kegiatan pemilu di Indonesia salah satu kewenangannya adalah melakukan penyebarluasan informasi pemilu dan pendidikan pemilih atau sosialisasi Pemilu.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan jumlah partisipan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivo R. T. Mentang tentang sosialisasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki hasil bahwa KPU telah menjalankan perannya dengan baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2014.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu<sup>15</sup>:

1. Penyuluhan dengan mengumpulkan masyarakat dan membentuk *forum group discussion* yang melibatkan panitia di tingkat kecamatan sehingga ada interaksi tanya jawab antara KPU dengan masyarakat.
2. KPU melakukan publikasi berbentuk pengumuman dan selebaran yang diletakkan di tempat umum seperti kedai dan toko sehingga masyarakat yang melewati akan mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan.
3. KPU juga memanfaatkan media yang sering digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan radio, reklame dan surat kabar daerah sehingga pemberian informasi dapat semakin luas dan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Ketika kemudahan dan kecepatan informasi dapat tercapai maka akan mampu meningkatkan partisipasi dalam pemilu yang akan datang.

### **1.6.5 Pemilih Pemula**

Rakyat merupakan sebuah subjek politik dalam pemilihan umum karena peran dalam partisipasi politik akan menentukan apakah berhasil atau tidak pemilihan tersebut.<sup>16</sup> Pemilih yang ada di Indonesia sangat beragam sehingga terdapat beberapa kategori pemilih yang salah satunya yaitu pemilih pemula, menurut Pahmi Sy pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang

---

<sup>15</sup> Mentang, Ivo R.T, "Peran KPU dalam Mensosialisasikan Program Pemilih Cerdas di Bolaang Mongondow".

<sup>16</sup> Afnaniyati, Mir'aatunnisa, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula Terhadap Angka Golput Pada Pilkada Lamongan 2010 Di Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan", Vol. 02. 2010.

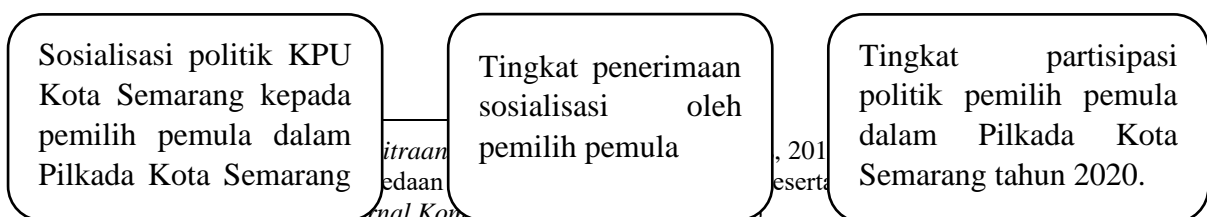
sudah memiliki cukup umur berusia 17 tahun atau lebih.<sup>17</sup> Sedangkan ada juga pendapat dari Kartikatantri mengenai pemilih pemula yaitu seseorang yang sudah memiliki hak untuk memilih berusia antara 17 sampai 21 tahun dan baru pertama kali melakukan pemilihan.<sup>18</sup> Dari beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilih muda adalah warga negara Indonesia yang ada di rentang usia 17 sampai 21 tahun dan baru pertama kali mengikuti penyelenggaraan pemilu di daerahnya.

Pemilih pemula secara umum didominasi oleh kaum muda yang berlatar belakang pelajar, mahasiswa/i maupun pekerja yang ada di kisaran usia 17-21 tahun. Pemilih pemula selama ini terus menerima pendidikan politik untuk membimbing mereka terhadap segala bidang yang ada dalam ruang lingkup politik supaya dapat berperan dengan baik, mengerti nilai-nilai konstitusi mengenai hak dan kewajiban, serta sadar akan pentingnya partisipasi politik dalam pemerintahan. Ciri-ciri pemilih pemula antara lain yaitu:

1. Seorang warga negara Indonesia yang berusia genap 17 tahun atau lebih.
2. Baru pertama kali mengikuti pemilu dan memberikan hak suaranya di usia antara 17-21 tahun.
3. Sudah memiliki hak untuk memilih dalam penyelenggaraan pilkada 2020.

### 1.7 Kerangka Pikir

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**





### 1.8 Operasionalisasi Konsep

<b>Konsep</b>	<b>Definisi Konsep</b>	<b>Dimensi Konsep</b>
Strategi sosialisasi politik KPU Kota Semarang kepada pemilih pemula	Rencana yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Materi sosialisasi politik yang dirancang dan digunakan</li><li>- Metode sosialisasi politik yang dirancang dan digunakan</li><li>- Media sosialisasi politik yang dirancang dan digunakan: Pemanfaatan teknologi, media massa, lembaga pendidikan, aktivitas kelompok/komunitas sosial</li></ul>

<b>Konsep</b>	<b>Definisi Konsep</b>	<b>Dimensi Konsep</b>
Penerimaan sosialisasi pemilu KPU Kota Semarang oleh pemilih pemula	Pemilih pemula sudah menerima materi sosialisasi pemilu dari KPU Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan pemilih pemula tentang Pilkada Kota Semarang 2020</li> <li>- Kesadaran akan hak dan kewajiban pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kota Semarang 2020 melalui penggunaan hak pilih</li> </ul>
Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilwakot 2020	Kehadiran pemilih pemula di TPS Pilwakot Kota Semarang 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan suara dalam Pilkada Kota Semarang 2020</li> </ul>

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang sistematis dan digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan fakta serta menganalisis fakta tersebut dari suatu fenomena atau peristiwa yang muncul menggunakan cara tertentu tergantung apa yang diteliti. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena terhadap subjek penelitian, metode ini digunakan untuk meneliti hal yang berkaitan dengan perilaku, sikap, persepsi dan tindakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan data yang sesuai keadaan di lapangan tanpa memanipulasi variable penelitian. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang diberikan oleh informan yang sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini akan menggunakan daftar pertanyaan telah dibuat secara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari narasumber mengenai Strategi Sosialisasi KPU Kota Semarang, selain itu peneliti melakukan perbandingan antara hasil yang didapatkan dari wawancara dengan fakta di lapangan menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penerimaan pemilih pemula di Kota Semarang. Sehingga dengan penggunaan metode kualitatif deskriptif maka didapatkan data yang menggambarkan pemilih pemula di Kota Semarang.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian akan dilaksanakan di Kota Semarang. Kota Semarang ini dipilih dengan pertimbangan wilayah perkotaan yang ada peningkatan partisipasi pemilih, pada Pilkada 2020 partisipasi pemilih 68,62% atau lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015 yang sebesar 65,48%.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian berkaitan dengan siapa yang akan diambil sebagai informan sampel untuk penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah KPU Kota Semarang,

---

<sup>19</sup> Hediansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, Hal. 6.



individu/kelompok pegiat sosialisasi yang berkerjasama dengan KPU Kota Semarang dan pemilih pemula Kota Semarang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dalam menentukan informan KPU dan pegiat sosialisasi. Sebagai informan penelitian ini adalah:

1. Novi Maria Ulfah selaku Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Untuk kategori pemilih, oleh karena penelitian ini dilakukan pada masa pandemic covid-19 maka pemilihan sampel sebanyak 100 pemilih pemula menggunakan Teknik non random, peneliti menjanging pemilih pemula menggunakan *google form* yang disebarakan melalui pesan whatsapp maupun media sosial lainnya.

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam menentukan besaran sampel, yaitu<sup>20</sup>:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

- n = besaran sampel
- N = besaran populasi
- e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Berdasar rumus tersebut dengan populasi pemilih pemula Kota Semarang sebanyak 270.224 pemilih dan dengan nilai kritis 10%, maka jumlah sampel adalah 99,93 atau dibulatkan menjadi 100 pemilih.

#### 1.9.4 Jenis Data

---

<sup>20</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016, Hal. 120

Data merupakan hasil pengamatan dari peneliti yang berbentuk kata maupun angka, data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sebelumnya telah didapatkan dari subjek penelitian akan diolah oleh peneliti supaya mendapatkan data yang jelas dan sesuai. Terdapat 2 jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan kuesioner.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung berupa dokumen KPU, data BPS dan hasil penelitian sebelumnya.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara, yakni tekni pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan penelitian secara tatap muka. Wawancara penelitian ini dilakukan kepada komisioner KPU dan individu/kelompok pegiat sosialisasi yang berkerjasama dengan KPU Kota Semarang dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data menggunakan fomulir sebagai media yang didalamnya berisi pertanyaan tertulis dan ditujukan pada seseorang/kelompok untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan

oleh peneliti.<sup>21</sup> Kuesioner penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup digunakan untuk mencari data dari pemilih pemula dengan memanfaatkan google form yang disebarakan melalui pesan whatsapp maupun media sosial lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia dalam dokumen KPU Kota Semarang, BPS Kota Semarang serta media cetak dan media online.

#### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Data yang terdapat dalam kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata dan tidak terdapat angka, data yang dikumpulkan peneliti untuk diolah sebelum dituangkan kedalam laporan penelitian. Data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis kualitatif, sedangkan data yang didapatkan dari kuesioner dikelompokkan menggunakan Excel dan disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui gambaran umum serta tingkat penerimaan responden.

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Hal. 53.